

## **Pengendalian Inflasi Dalam Sistem Ekonomi Islam**

**Hamdan Ardiansyah**

Mahasiswa S3 UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
hamdan.mpd@gmail.com

### **Abstrak**

Inflasi dianggap sebagai fenomena moneter yang disebabkan oleh penurunan nilai unit mata uang terhadap suatu komoditas. Fenomena moneter ini berakibat negatif pada perekonomian karena menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, distorsi harga, merusak output, meruntuhkan efisiensi dan investasi produktif dan menimbulkan ketidakadilan serta ketegangan sosial di masyarakat. Ekonomi Islam menawarkan solusi untuk mengatasi inflasi diantaranya reformasi terhadap sistem moneter, menghubungkan antara kuantitas peredaran uang dengan kuantitas produksi, mengarahkan belanja dan melarang sikap berlebihan, mencegah pemenimbunan barang komoditas dan meningkatkan produksi. Solusi lain yang diterapkan untuk mengatasi inflasi adalah dengan menerapkan fiscal policy yang diantaranya memaksimalkan penghimpunan zakat serta pengoptimalan pemanfaatan zakat, mengenakan biaya atas dana yang menganggur (cost of idle fund), dan menggunakan prinsip bagi hasil pada setiap transaksi atau segala jenis usaha dan meninggalkan bunga.

**Keyword :** Inflasi, ekonomi islam, Uang

### **Abstract**

*Inflation is considered a monetary phenomenon caused by a decrease in the value of a unit of currency against a commodity. This monetary phenomenon has a negative impact on the economy because it causes disruption to the function of money, distortion of prices, damages output, undermines efficiency and productive investment and causes injustice and social tensions in society. Islamic economics offers solutions to overcome inflation including reforms to the monetary system, linking the quantity of money circulation with the quantity of production, directing spending and prohibiting excess, preventing hoarding of commodity goods and increasing production. Another solution applied to overcome inflation is to implement fiscal policies which include maximizing zakat collection and optimizing zakat utilization, charging fees for idle funds, and using profit sharing principles on every transaction or all types of businesses and leaving interest.*

**Keyword :** Inflation, Islamic economics, Money

## 1. PENDAHULUAN

Inflasi adalah suatu keadaan dimana harga suatu barang tertentu mengalami kenaikan yang terus menerus dan berlangsung dalam periode waktu tertentu secara menyeluruh. Inflasi merupakan suatu peristiwa moneter yang dapat mengakibatkan terjadinya penurunan nilai mata uang terhadap suatu barang tertentu sehingga Peristiwa ini akan menyebabkan gangguan terhadap fungsi uang itu sendiri, terjadi distorsi harga, mengakibatkan rusaknya output di pasar produksi, meruntuhkan efisiensi dan investasi produktif, serta menimbulkan ketidakadilan serta ketegangan sosial di masyarakat.

Inflasi dikatakan sebagai *a rise in the general level of prices*,<sup>1</sup> yang berarti Inflasi merupakan kenaikan harga secara umum dari suatu barang dan jasa selama periode waktu tertentu. Secara umum Inflasi diakibatkan oleh meningkatnya daya beli masyarakat terhadap suatu barang, ketika daya beli masyarakat terhadap suatu barang mengalami kenaikan maka dapat diartikan bahwa permintaan masyarakat terhadap suatu barang naik namun stok akan barang tersebut sedikit atau terbatas, sehingga terjadilah kenaikan harga. Inflasi juga dapat sebabkan karena Biaya produksi yang mengalami kenaikan sehingga ketika terjadi kenaikan harga bahan baku dan kenaikan gaji karyawan, produsen akan mengambil tindakan untuk menaikkan harga komoditas tersebut. Selain itu, inflasi juga bisa di akibatkan karena terlalu banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat hal tersebut diakibatkan karena, jika peredaran jumlah uang masyarakat banyak maka daya beli masyarakat terhadap suatu barang akan meningkat dan barang tersebut terbatas sehingga terjadi kenaikan harga.

Indonesia pernah mengalami terjadinya Inflasi yang cukup tinggi pada tahun 1998 dengan angka mencapai 77,6%. Inflasi tersebut diantarnya diakibatkan oleh penyusutan nilai tukar rupiah, krisis ekonomi dan ekspektasi terhadap Inflasi yang tinggi. Sebelumnya Indonesia juga mengalami kejadian hiper serupa dengan mengalami hiper Inflasi pada pada tahun 1966 saat orde lama berakhir. Sehingga secara psikologis Inflasi merupakan krisis bagi masyarakat Indonesia. Salah satu Cara yang dapat dilakukan untuk mengendalikan Inflasi tersebut adalah dengan menerapkan kebijakan Moneter. Kebijakan moneter didefinisikan sebagai rencana dan tindakan otoritas moneter yang terkoordinasi untuk menjaga keseimbangan moneter, kestabilan nilai uang, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat<sup>2</sup>. Kebijakan Moneter dapat dilaksanakan oleh pihak otoritas Moneter yaitu Bank central dengan mempengaruhi variabel Moneter yaitu jumlah uang yang beredar.

Inflasi merupakan kondisi ekonomi yang selalu menarik untuk dibahas karena terkaitan dengan dampaknya yang begitu luas terhadap ekonomi secara agregat atau makro yaitu berkaitan pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi, daya saing, tingkat bunga, dan bahkan distribusi pendapatan. Tingkat inflasi nol persen bukanlah tujuan utama kebijakan pemerintah karena hal itu sangat sukar untuk dicapai dan bisa mengakibatkan deflasi. Yang paling utama adalah bagaimana mengendalikan tingkat inflasi agar tetap rendah. Inflasi yang normal adalah inflasi yang rendah, yaitu antara 0-4 persen, ada juga yang membatasinya dengan inflasi satu digit.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> McConnel dan Stanley Campbell, R, *Economics: Principles, Problems, and Policies* (McGraw: Hill Publishing, 1990), 432.

<sup>2</sup> Padji Aliminsyah, *Kamus Istilah Keuangan Dan Perbankan* (Bandung: Yrama Widya, 2016), 186.

<sup>3</sup> Idris Parakkasi, "INFLASI DALAM PERSPEKTIF ISLAM" 3 (n.d.): 18.

Apabila suatu negara ingin mengendalikan laju Inflasi yang rendah, maka pemerintah harus mengendalikan kenaikan harga. Usaha untuk mengendalikan harga tersebut dapat dilakukan dengan menekan laju kenaikan jumlah uang beredar misalnya dengan pembatasan pemberian kredit atau dengan menaikkan suku bunga pinjaman (*tight money policy*). Tetapi dampak yang ditimbulkan adalah akan terjadi kelesuan investasi, dan meningkatnya pengangguran yang pada akhirnya akan menurunkan Pendapatan Nasional. Perlu kita ingat bahwa tingkat Inflasi yang terlalu rendah juga akan sangat berbahaya apabila sampai mencapai angka deflasi. Dalam ekonomi, deflasi merupakan kebalikan dari Inflasi yaitu suatu keadaan di mana harga-harga secara umum jatuh dan nilai uang bertambah. Inflasi yang terlalu rendah akan sangat berdampak pada para pengusaha. Para pengusaha menjadi rugi dan mengakibatkan ekonomi menjadi lesu, sehingga banyak PHK dimana-mana dan akhirnya pendapatan masyarakat menurun.

Ekonomi yang lesu akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara menjadi menurun. Tingkat Inflasi yang normal selaras dengan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pada negara-negara berkembang, Inflasi yang dianggap wajar apabila berada di angka 3%-4% setiap tahun dengan toleransi deviasi antara 1%-2%. Tetapi untuk negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang, biasanya bank sentral menargetkan Inflasi sebesar 2%. Apabila terjadi hiperInflasi maka itu menandakan bahwa suatu negara mengalami krisis ekonomi (resesi).

Pengaruh inflasi cukup besar pada kehidupan ekonomi, inflasi merupakan salah satu masalah ekonomi yang banyak mendapat perhatian para ekonom, pemerintah, maupun masyarakat umum. Berbagai teori, pendekatan dan kebijakan dikembangkan supaya inflasi dapat dikendalikan sesuai dengan yang diinginkan. Untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti mengenai Inflasi dan bagaimana mengatasinya dalam Islam, maka artikel ini akan membahas mengenai “Pengendalian Inflasi dalam sistem ekonomi Islam”.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode dalam penulisan artikel ini yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan melalui pendekatan kualitatif *deskriptif-analitik*. Menurut Furchan dan Maimun pendekatan kualitatif deskriptif-analitik yaitu penelitian yang ditekankan pada penelusuran dan penelaahan sumber-sumber tertulis dan bahan bacaan lain yang ada kaitannya dengan tema yang dibahas untuk selanjutnya dikaji dan ditelaah secara mendalam.<sup>4</sup> Sedangkan Studi kepustakaan tidak hanya sekedar membaca dan mencatat literatur/buku tetapi membaca dan juga mengolah bahan penelitian. Studi pustaka ini juga mendeskripsikan objek dari suatu penelitian kemudian menganalisisnya. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian adalah Analisis Konten (analisis isi). Analisis konten adalah penelitian yang bersifat mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak di media massa.

Penelitian ini juga dapat dikatakan sebagai penelitian *library research* (penelitian kepustakaan). Penelitian kepustakaan yang di maksud adalah penelitian yang menggunakan data-data tertulis seperti buku, kitab, majalah, jurnal, surat kabar dan lain-lain. Karena untuk memperoleh data-data yang baik, maka harus digunakan teknik-teknik tertentu, diantaranya adalah *research* yakni pengumpulan bahan dengan membaca buku-

---

<sup>4</sup> Furchan, Arif, and Agus Maimun, *Metode Penelitian Mengenai Tokoh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

buku, jurnal dan bentuk-bentuk bahan lain.<sup>5</sup> Pengumpulan data tersebut diantarnya terdiri dari sumber data perimer dan skunder.

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari buku-buku serta jurnal ekonomi berhubungan dengan penelitian ini yang dijadikan sebagai sumber utama, Sedangkan data skunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab-kitab serta data-data dari website atau media lainnya dengan membahas materi yang di teliti. sebagai data pendukung Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan meneliti sejumlah kepustakaan (*library research*), kemudian memilih-milahnya dengan memprioritaskan karya yang telah teruji kebenarannya.<sup>6</sup>

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **a. Teori Inflasi dalam Ekonomi Islam**

Taqiuddin Ahmad ibn al-Maqrizi (1364M - 1441M), merupakan murid dari Ibnu Khaldun, ia merupakan ekonom islam yang cukup populer dengan pemikiranya, yaitu mengklasifikasikan inflasi dalam dua golongan yaitu inflasi yang disebabkan karena kekurangnya persediaan barang (*Natural inflation*) dan inflasi yang disebabkan karena kesalahan manusia (*Human Error Inflation*).<sup>7</sup> Inflasi bentuk pertama inilah yang terjadi pada saat zaman Rasulullah dan khulafaur Rasyidin. Hal tersebut terjadi karena kekeringan atau peperangan, sementara itu, Inflasi jenis kedua menurut Al-Maqrizi disebabkan oleh tiga hal. Pertama, korupsi dan administrasi yang buruk. Kedua, pajak berlebihan yang memberatkan petani. Ketiga, jumlah uang yang berlebihan.

##### **1. Inflasi Alamiah (*Natural Inflation*)**

Inflasi Alamiah adalah inflasi yang terjadi tanpa ada sebab yang mendorong terjadinya inflasi, hal tersebut terjadi secara alamiah, bukan karena disebabkan oleh berbagai macam penyimpangan yang dilakukan oleh para penguasa negara. Menurut Al-Maqrizi, ketika suatu bencana alam terjadi, berbagai bahan makanan dan hasil bumi lainnya mengalami gagal panen, sehingga persediaan barang-barang tersebut mengalami penurunan yang sangat drastis dan terjadi kelangkaan. Di lain pihak, karena sifatnya yang sangat signifikan dalam kehidupan, permintaan terhadap berbagai barang itu mengalami peningkatan. Harga-harga membumbung tinggi jauh melebihi daya beli masyarakat.<sup>8</sup>

Al-Maqrizi mengatakan bahwa inflasi ini adalah inflasi yang diakibatkan oleh turunnya Penawaran Agregatif (AS) atau naiknya Permintaan Agregatif (AD), hal tersebut sangat berdampak terhadap kenaikan harga dari berbagai barang dan jasa. Akibatnya, transaksi ekonomi akan mengalami kendala, bahkan

---

<sup>5</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, 5 (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991), 24.

<sup>6</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet.12 (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 206.

<sup>7</sup> Adiwarman A Karim, *Ekonomi Makro Islami* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), 140.

<sup>8</sup> Karim, 140.

akan terjadi kebangkrutan para pengusaha, yang pada akhirnya menimbulkan bencana kelangkaan kebutuhan dan pengangguran yang semakin tinggi di kalangan masyarakat.

*Natural inflation* dapat diartikan sebagai Gangguan terhadap jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian serta naiknya daya beli masyarakat secara riil. *Natural inflation* dapat dibedakan berdasarkan penyebabnya menjadi dua yaitu:

- a. Uang yang masuk dari luar negeri terlalu banyak karena ekspor meningkat dibandingkan nilai impor sehingga hal tersebut mengakibatkan naiknya permintaan agregatif. Keadaan tersebut pernah terjadi pada masa Umar ibn Khatab, pada masa itu eksportir yang menjual barangnya ke luar negeri lebih besar dari jumlah barang yang mereka jual (*positive net export*). Kejadian tersebut menjadikan keuntungan berupa peningkatan uang yang akan dibawa ke Madinah sehingga pendapatan dan daya beli masyarakat meningkat. Naiknya permintaan agregat akan mengakibatkan naiknya tingkat harga secara keseluruhan. Untuk mengatasi keadaan tersebut Umar bin Khatob melarang penduduk Madinah untuk membeli barang-barang atau komoditi selama 2 hari berturut-turut, akibatnya terjadi penurunan permintaan agregatif dan tingkat harga kembali normal.
- b. Turunnya tingkat produksi disebabkan terjadinya kejadian alam atau pun perang seperti paceklik, kondisi perang ataupun embargo ekonomi. Masa paceklik ini pernah terjadi pada masa Umar ibn Khatab yang mengakibatkan kelangkaan gandum sehingga mengakibatkan naiknya tingkat harga-harga.

## 2. Human Error Inflation

*Human Error Inflation* adalah inflasi yang terjadi karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia sendiri (QS Ar-Rum ayat 41), yang artinya; “*Telah Nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).*”

*Human Error Inflation* dapat dikelompokkan menurut penyebab-penyebabnya sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Korupsi dan administrasi yang buruk (*corruption and bad administration*).

Korupsi dan administrasi yang buruk akan mendorong tingkat harga yang tinggi, karena produsen akan menyesuaikan harga jual pada produksinya untuk menutupi biaya-biaya tambahan yang telah mereka bayarkan. Birokrasi buruk dengan proses perijinan yang berbelit-belit juga akan mendorong kenaikan harga barang produsen karena mereka akan terbebani dengan biaya yang cukup banyak dalam proses adminitrasi sehingga akan menambah biaya produksi yang berakibat pada kenaikan harga.

Jika menggunakan pendekatan permintaan agregat (AD) dan penawaran agregat (AS), maka korupsi dan administrasi yang buruk akan

---

<sup>9</sup> Karim, 143.

menyebabkan kontraksi pada kurva penawaran agregat, yang menyebabkan terjadinya harga ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*). Harga menjadi lebih tinggi disebabkan karena ada biaya yang tidak semestinya masuk sehingga tidak mencerminkan nilai yang seharusnya dalam proses produksi yang mengakibakan ineffisiensi. Selain menyebabkan ineffisiensi alokasi sumber daya dan ekonomi biaya tinggi, korupsi dan administrasi yang buruk akan dapat menyebabkan perekonomian terpuruk.

b. Pajak yang berlebihan (*excessive tax*).

Efek yang dihasilkan karena pemberlakuan pengenaan pajak yang berlebihan oleh pemerintah pada perekonomian akan memberikan dampak yang hampir sama dengan akibat yang ditimbulkan oleh korupsi dan administrasi yang buruk yaitu terjadinya kontraksi pada kurva penawaran agregat. Harga akan menjadi lebih mahal karena biaya produksi yang dikeluarkan harus bertambah dengan biaya pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Jika terjadi pemberlakuan pajak yang berlebihan hal tersebut akan berdampak pada harga jual yang dilakukan pada masyarakat. Jika diperhatikan lebih lanjut, pajak yang berlebihan menurut para ekonom akan mengakibatkan pada *efficiency loss* atau *dead weight loss*

c. Pencetakan uang untuk menarik keuntungan (*Excessive Seigniorage*).

*Excessive Seigniorage* yaitu keuntungan yang diperoleh dari pencetakan uang yang digunakan menutupi anggaran belanja negara, biasanya percetakan tersebut dilakukan oleh pemerintah. Percetakan uang yang berlebihan akan menyebabkan terlalu banyaknya jumlah uang beredar di masyarakat, hal tersebut akan berdampak pada penurunan nilai mata uang

Ibn al-Maqrizi mengungkapkan bahwa mencetak uang secara berlebihan akan menyebabkan naiknya tingkat harga, sehingga menurutnya nilai mata uang akan menurun secara drastis yang berakibat uang tidak lagi bernilai. Menurutnya kenaikan harga suatu komoditas adalah kenaikan dalam bentuk jumlah uang, sedangkan jika diukur dengan emas (dinar), harga-harga komoditas itu jarang sekali mengalami kenaikan. Uang sebaiknya dicetak hanya pada tingkat minimal yang dibutuhkan untuk bertransaksi dan dalam pecahan yang mempunyai nilai nominal yang kecil.<sup>10</sup>

## **b. Pengendalian Inflasi dalam Ekonomi Islam**

Pengendalian inflasi merupakan kewajiban bagi pemerintah suatu negara karena masalah kondisi makro ekonomi akan secara langsung berdampak kepada masyarakat. Untuk mengatasinya yang dapat dilakukan pemerintah yaitu dengan cara melakukan

---

<sup>10</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah pemikiran ekonomi Islam*, Ed. 3 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 429.

beberapa kebijakan yang menyangkut bidang moneter , fiskal, dan non moneter. kebijakan pemerintah (kebijakan fiskal) maupun otoritas moneter (kebijakan moneter) merupakan bagian dari upaya mengendalikan inflasi. Apabila inflasi di definisikan dengan kecenderungan kenaikan harga-harga secara umum, maka akan kita pahami bahwa pada setiap perekonomian akan senantiasa ditemui permasalahan inflasi.

### **1. Kebijakan Fiskal**

Menurut An-Nabahan dalam pemikiran ekonomi islam, pemerintah merupakan lembaga formal yang memiliki kewajiban untuk mewujudkan dan memberikan pelayanan terbaik kepada rakyatnya. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, tanggung jawab pemerintah terhadap perekonomian salahsatunya dengan mengawasi dan melakukan intervensi pada faktor utama penggerak perekonomian.<sup>11</sup>

Pemerintah Islam menggunakan dua kebijakan, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan tersebut telah dilaksanakan sejak zaman Rasullullah dan *Khulafaur Rosyidin* kemudian dikembangkan oleh para ulama. Tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan, ditambah tujuan lain yang terkandung dalam aturan Islam.<sup>12</sup>

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang sangat penting bagi negara sejahtera. kebijakan ini mencakup pengeluaran pemerintah untuk kepentingan umum, pajak dan pinjaman untuk menstabilkan ekonomi negara dan kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran untuk kepentingan umum yang dimaksud adalah untuk fungsi negara sejahtera dalam meningkatkan pertumbuhan, stabilitas ekonomi dan persamaan pendapatan yang lebih besar.<sup>13</sup> MA. Mannan berpendapat bahwa prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan seimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. yang dimaksud nilai material adalah nilai yang berguna bagi jasmani manusia yaitu kebutuhan akan sandang, pangan, papan. Sedangkan yang dimaksud nilai spiritual adalah nilai yang berguna bagi rohani manusia yaitu nilai religi (agama), nilai estetika, nilai etika/moral dan nilai kebenaran secara umum. Dengan demikian Chapra dan Mannan menghendaki kebijakan fiskal dalam rangka menekan inflasi tidak hanya meletakkan orientasi material akan tetapi perlu meletakkan nilai-nilai spiritual.<sup>14</sup>

Menurut Umer Chapra strategi untuk menekan inflasi yaitu: Pertama, perbaikan moral (yang dikehendaki bukan hanya dimensi material tapi juga dimensi spiritual). Kedua, distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. Ketiga, penghapusan riba.<sup>15</sup>

#### **1. Perbaikan moral**

---

<sup>11</sup> M. Faruq An-Nababan, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis Dan Sosialis* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 59.

<sup>12</sup> Majid M Nazori, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf Relevansinya Dengan Ekonomi Kekinian* (Yogyakarta: : Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI) Sekolah Tinggi Ilmu Syariah, 2003), 221–23.

<sup>13</sup> Muhammad Umer Chapra and Ikhwan Abidin Basri, *Masa depan ilmu ekonomi: sebuah tinjauan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press : Tazkia Cendekia, 2001), 124.

<sup>14</sup> Samsul Samsul, Najamuddin Mara Hamid, and Hotman Guba Nasution, "Sistem Pengendalian Inflasi dalam Sistem Ekonomi Islam," *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (January 30, 2019): 16–28, <https://doi.org/10.37146/ajie.v1i1.10>.

<sup>15</sup> Chapra and Basri, *Masa depan ilmu ekonomi*, 112.

Kesejahteraan manusia akan dapat diperoleh melalui pemenuhan kebutuhan material dan spiritual manusia. Ekonomi Islam mendorong manusia untuk menguasai alam dan memanfaatkan sumber daya yang diberikan oleh Tuhan untuk kebaikan manusia, Islam juga memberikan pelajaran kepada manusia untuk tidak terpaku pada satu hal dengan menganggap pemenuhan materi sebagai tolok ukur dari utama sebagai pemenuhan kesejahteraan manusia dan melupakan nilai spiritual manusia itu sendiri. Islam menganggap kehidupan material dan kehidupan spiritual harus saling melengkapi sebagai satu kesatuan dan secara bersama-sama sebagai landasan bagi kesejahteraan dan kebahagiaan manusia yang sesungguhnya. Bersatunya semua hal tersebut akan meningkatkan moral manusia dan masyarakat dalam kehidupan ekonomi. Dengan peningkatan semangat semacam itu, maka tidak akan ada satu tujuan pun yang dapat direalisasikan dalam kesejahteraan manusia yang sesungguhnya, hal itu akan membawa pada inti konsep kesejahteraan dalam Islam.

2. Distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata

Islam telah memberikan pedoman dalam pengorganisasian seluruh aspek kehidupan termasuk dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh semua sistem ekonomi, hal tersebut tidak akan bisa dicapai tanpa ada kayakinan mengenai persaudaraan manusia berdasarkan keimanan. Persaudaran dan perhatian untuk saling membantu di antar manusia hanya di dorong dari sikap religi seseorang sehingga proses pendampatan dan kekayaan yang merata akan mudah dicapai.

3. Penghapusan riba

Konsep penghapusan riba dalam kehidupan ekonomi islam selain sudah menjadi perintah agama, hal tersebut dipercaya dapat menghilangkan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi dan menghilangkan penindasan terhadap sesama manusia. Konsep bagi hasil menjadi bagian terpenting dalam menciptakan kondisi ekonomi yang seimbang.

Peranan dalam Kebijakan fiskal akan sangat berpengaruh pada kondisi ekonomi suatu negara. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan ekonomi tersebut, ada beberapa instrumen yang bisa digunakan dalam kebijakannya yaitu :

- a. Pengaturan Pengeluaran Pemerintah, Pemerintah harus menjaga penggunaan anggaran negara agar sesuai dengan perencanaan. Sehingga tidak melampaui batas yang telah direncanakan yang dapat mendorong pertambahan uang beredar dan sebaliknya.
- b. Peningkatan dan Penurunan Tarif Pajak Dengan mengontrol kebijakan mengenai tarif pajak dapat menstabilkan daya beli masyarakat dan kemampuan produksi barang dan jasa.
- c. Mengoptimalkan penghimpunan dan pemanfaatan zakat. Pemaksimalan penghimpunan zakat dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam kegiatan yang bertujuan dalam menjamin stabilitas ekonomi. Hal ini ditempuh apabila diasumsikan suatu perekonomian dalam kondisi *full employment*, maka kenaikan permintaan agregat tidak akan menimbulkan kenaikan pada pendapatan riil nasional.

- d. Mengenakan biaya atas dana yang menganggur (*cost of idle fund*), hal ini agar mendorong masyarakat untuk menginvestasikan dananya tidak hanya melalui tabungan dan deposito tetapi diarahkan pada penciptaan pertumbuhan sektor riil. Dengan adanya biaya, maka setiap masyarakat dituntut untuk menginvestasikan dana yang mereka miliki tersebut.
- e. Menggunakan prinsip bagi hasil pada setiap transaksi atau segala jenis usaha dan meninggalkan bunga. Pada sistem bagi hasil segala pihak yang terlibat akan membagi keuntungan dan kerugian bersama sesuai proporsi modalnya masing-masing, dengan demikian segala bentuk transaksi baik itu sektor rumah tangga, swasta maupun pemerintah semua dapat menjalankan prinsip bagi hasil tanpa menggunakan bunga.

Pemerintah dalam ekonomi Islam harus lebih tegas untuk menjamin bahwa penarikan dari hasil zakat yang dihimpun dari setiap muslim ketika memiliki kelebihan harta yang telah mencapai *nishab*. Tujuan dari kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan, ditambah dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan Islam yaitu Islam menetapkan pada tempat yang tinggi akan terwujudnya persamaan dan demokrasi sesuai dengan QS. 59:7, yang artinya : “*Apa saja harta rampasan (fa'i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.*”

Ekonomi Islam akan mendorong membantu dan mendukung ekonomi masyarakat yang terbelakang dan untuk memajukan serta menyebarkan ajaran Islam seluas mungkin. Penggunaan kebijakan fiskal juga dapat menciptakan kesempatan kerja, hal tersebut dapat terwujud apabila investasi yang diperoleh selain dipergunakan untuk menghilangkan kesenjangan antara pendapatan nasional dengan pengeluaran konsumsi agregat, maka diharapkan tingkat keuntunganpun dapat tercapai sehingga dapat mengajak para pengusaha untuk ikut membuka investasi baru yang akan menyerap banyak tenaga kerja. Selain itu hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah diantarnya adalah menarik beban atas harta yang menganggur, sehingga akan mendorong masyarakat untuk mengoptimalkan dananya untuk memberdayakan sumber daya atau investasi dalam rangka menciptakan pekerjaan baru bagi masyarakat.

## **2. Kebijakan Moneter**

Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang berasal dari bank sentral dalam mengatur jumlah uang yang beredar melalui instrument moneter yang dimiliki. Melalui instrument tersebut diharapkan peredaran uang dapat diatur dan inflasi dapat dikendalikan sesuai dengan yang telah ditargetkan. Terdapat tiga kebijakan yang dapat di tempuh bank sentral dalam mengatur inflasi:

- a. Kebijakan Diskonto (*discount policy*) yaitu kebijakan bank sentral untuk mempengaruhi peredaran uang dengan jalan menaikkan dan menurunkan tingkat bunga. Kaitannya dengan bank syari'ah yaitu dengan jealan menaikkan dan menurunkan tingkat nisbah bagi hasil.

- b. Operasi Pasar Terbuka yaitu dengan kebijakan bank sentral dengan jalan membeli dan menjual surat-surat berharga. Sehingga bisa manarik atau menyalurkan uang dalam rangka pengendalian uang yang beredar di masyarakat
- c. Kebijakan Persediaan Kas (*cash ratio policy*) yaitu kebijakan bank sentral untuk mempengaruhi peredaran uang dengan jalan menaikkan dan menurunkan persentasi persediaan kas dari bank.

Kebijakan monter dalam ekonomi islam yaitu dengan melakukan percepatan pada perputaran uang pada sector rill untuk di gunakan secara optimal dan berkesinambungan sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus stabilitas. Ekonomi Islam tidak menggunakan instrument bunga atau ekspansi moneter melalui pencetakan uang baru atau defisit anggaran. Hal yang harus dilakukan dalam konsep kebijakan moneter dalam perekonomian Islam adalah stok uang, bukan tingkat suku bunga. Perbankan harus mengarahkan kebijakan moneternya dalam rangka mendorong pertumbuhan dalam penawaran uang yang cukup untuk membiayai pertumbuhan pembangunan potensial, baik dalam tujuan jangka menengah maupun jangka panjang sehingga dapat tercapai harga yang stabil dan stabilitas sosio-ekonomi.

Untuk menjaga stabilitas tingkat harga dalam perekonomian islam, ada beberapa hal yang tidak diperbolehkan yaitu:

- a. Segala bentuk riba.
- b. Tidak diperbolehkan untuk menimbun uang.
- c. Permintaan uang digunakan untuk keperluan transaksi yang tidak riil dan berjaga-jaga.
- d. Transaksi *tallaqi rukban* yaitu transaksi yang dilakukan dengan mencegat penjual dari daerah pinggiran di luar kota untuk dijual kembali di pusat kota demi mendapatkan keuntungan dari ketidakpastian harga.
- e. Transaksi *kali bi kali*. Yaitu transaksi tidak tunai yaitu transaksi *future* tanpa ada barangnya yang diperjualbelikan

Menurut Chapra dalam strategi kebijakan monter, hal yang dapat dilakukan untuk membantu pengaturan penawaran uang sesuai dengan permintaan riil dan juga membantu memenuhi kebutuhan untuk menutup defisit APBN pemerintah dan juga sekaligus mencapai tujuan-tujuan lain masyarakat. Maka hal tersebut harus mencakup beberapa elemen yang harus dilakukan, diantaranya:<sup>16</sup>

- a. Target pertumbuhan pada M dan M0

Secara berkala bank sentral harus menetapkan pertumbuhan penawaran uang (M) sesuai dengan sasaran ekonomi nasional, termasuk pertumbuhan ekonomi yang dapat dipertahankan dan stabilitas dalam nilai uang.

- b. *Public share of demand deposit*

Dalam jumlah tertentu (kondisi normal) demand deposit bank-bank komersil maksimum sampai 25% harus diserahkan kepada pemerintah untuk mebiayai proyek-proyek yang secara sosial menguntungkan.

- c. *Statutory reserve requirement*

Bank-bank komersil harus memiliki cadangan dalam jumlah tertentu yaitu 10%-20% dari demand deposit mereka dengan bank sentral. Begitu pula

<sup>16</sup> M. Umer Chapra, *Sistem moneter Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 173–76.

sebaliknya dengan bank sentral. Statutory reserve requirement membantu memberikan jaminan atas deposit juga sekaligus membantu penyediaan likuiditas yang memadai bagi bank.

#### **4. KESIMPULAN**

Inflasi merupakan suatu kondisi ketika terjadi kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam periode waktu tertentu di suatu kawasan perekonomian. Dalam perspektif islam inflasi diartikan sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit uang terhadap suatu komoditas. Berdasarkan pada sumber atau penyebab atas kenaikan harga-harga yang berlaku, inflasi biasanya dibedakan kepada tiga bentuk yaitu *demand pull inflation*, *cost push inflation*, *mixed inflation*. Sedangkan dalam perspektif islam, inflasi berdasarkan penyebabnya dikelompokkan menjadi dua yakni *natural inflation* dan *human error inflation*.

Terjadinya inflasi berakibat buruk pada perekonomian suatu negara karena akan menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, distorsi harga, meruntuhkan efisiensi dan investasi produktif serta menimbulkan ketidak-adilan juga ketegangan sosial. Terdapat dua macam kebijakan yang digunakan untuk mengatasi inflasi yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Ekonomi Islam menawarkan solusi untuk mengatasi inflasi diantaranya reformasi terhadap sistem moneter dengan meniadakan segala bentuk *interest* dan menerapkan *fiscal policy* yang diantara instrumennya adalah dengan memaksimalkan penghimpunan zakat serta pengoptimalan pemanfaatan zakat, mengenakan biaya atas dana yang menganggur (*cost of idle fund*), dan menggunakan prinsip bagi hasil pada setiap transaksi atau segala jenis usaha dan meninggalkan bunga. Idealnya, kebijakan ekonomi makro harus bertujuan menstabilkan harga-harga.

#### **5. REFERENSI**

- Aliminsyah, Padji. Kamus Istilah Keuangan Dan Perbankan. Bandung: Yrama Widya, 2016.
- An-Nababan, M. Faruq. Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis Dan Sosialis. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Cet.12. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.
- Boediono. Pengantar Ilmu Ekonomi Makro. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1995.
- Campbell, R, McConnel dan Stanley. Economics: Principles, Problems, and Policies. McGraw: Hill Publishing, 1990.
- Chapra, M. Umer. Sistem moneter Islam. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Chapra, Muhammad Umer, and Ikhwan Abidin Basri. Masa depan ilmu ekonomi: sebuah tinjauan Islam. Jakarta: Gema Insani Press : Tazkia Cendekia, 2001.
- Furchan, Arif, and Agus Maimun. Metode Penelitian Mengenai Tokoh. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Karim, Adiwarman A. Ekonomi Makro Islami. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007.

- Karim, Adiwarman Azwar. Sejarah pemikiran ekonomi Islam. Ed. 3. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- M Nazori, Majid. Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf Relevasinya Dengan Ekonomi Kekinian. Yogyakarta: : Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI) Sekolah Tinggi Ilmu Syariah, 2003.
- Nawawi, Hadari. Metode Penelitian Bidang Sosial. 5. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991.
- Nopirin. Pengantar Ilmu Ekonomi Makro & Mikro. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1997.
- Parakkasi, Idris. "INFLASI DALAM PERSPEKTIF ISLAM" 3 (n.d.): 18.
- Samsul, Samsul, Najamuddin Mara Hamid, and Hotman Guba Nasution. "Sistem Pengendalian Inflasi dalam Sistem Ekonomi Islam." *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (January 30, 2019): 16–28. <https://doi.org/10.37146/ajie.v1i1.10>.
- Sukirno, Sadono. Pengantar teori ekonomi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- "Fattah, Nanang. 'Pembentukan Pendekatan: Landasan Teori Dan Studi Empiris.' *Jurnal Pendidikan Dasar* 9 (2008): 1-4.," n.d.
- Habsyi, Irsan. "Manajemen Pembentukan Pendekatan Pada SMP Negeri 13 Kota Ternate." *EDUKASI : Jurnal Pendidikan* 14, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.33387/j.edu.v14i2.199>.
- Haryati, Sri. "Pengembangan Model Manajemen Pembentukan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) Di Kota Magelang." *Journal of Economic Education* 1, no. 1 (2012).
- "Https://Jambi.Kemenag.Go.Id/News/5230/Gubernur-Kunjungi-Ponpes-Nurul-Haq-Semurup.Html," n.d.
- Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, hlm. 87-88. "No Title," n.d.
- "Levin, Michal. Spiritual Inteligence. Gramedia Pustaka Utama, 2000.," n.d.
- Muhammad, Manajemen Pembentukan Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), hlm. 41. "No Title," n.d.
- Muhammad Anis. "Manajemen Pembentukan Pendekatan Di SDIT Assalamah Ungaran." Universitas Negeri Semarang, 2013.
- "Mustika Rimadhani, Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pembentukan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008.01-2011.12, (Media Ekonomi Vol. 19, No. 1, April 2011), Hlm. 31," n.d.
- "Peraturan Menteri Pendekatan Nasional No 69 Tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB," 2009.
- "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 57 Tentang Standar Nasional Pendekatan," 2021.
- "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021," n.d.
- "Sulistyoningrum, Nining. 2010. Standar Pembentukan Pendekatan. Dari Http://Niningsulistyoningrum. Wordpress. Com/2010/05 /15/Standar-Pembentukan-Pendekatan/Diunduh Pada Tanggal 27 Maret 2013," n.d.